

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang praktik politik uang di dalam pemilihan kepala desa sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang mengangkat isu politik uang, seperti halnya yang dilakukan oleh Alifah dan Sari (2020) mengatakan bahwa pada setiap pergantian kepala desa di Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selalu terjadi isu mengenai praktik politik uang selama proses kampanye. Kedua, penelitian Astuti dan Malia (2022) mengatakan bahwa adanya praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 dan 2021. Kemudian, penelitian terdahulu dari Amanu (2015) juga mengatakan bahwa selalu terdapat praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkades di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Melihat bahwa politik uang bukan hal yang baru dan akan terus hadir sejalan dengan pesta demokrasi, maka peneliti berkeinginan untuk melengkapi lebih lanjut isu tersebut dalam perspektif sosiologi.

Pilkades merupakan proses pemilihan kepala desa yang dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Pilkades adalah suatu cara praktek demokrasi pada ruang lingkup yang paling sederhana, adapun yang terlibat sebagai pelaksana, peserta, dan pemilihnya adalah masyarakat desa itu sendiri (Averus, et al., 2020).

Desa dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa, kepala desa adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) dimana dalam satu periode kepala desa dapat menjabat selama enam tahun dan dapat menjabat sebanyak tiga periode secara berturut-turut. Kepala desa dapat memegang jabatan sebanyak tiga kali periode secara berturut-turut ataupun tidak

berturut-turut dengan masa jabatan enam tahun dalam satu kali periode (Farera, et al., 2022)

Kepala desa bertanggung jawab dalam hal apapun di tingkat desa dan berkewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pemeliharaan ketertiban keamanan desa, dan pemberdayaan desa sesuai dengan keadaan sosial budaya yang ada (Rahayu, 2022). Tugas-tugas kepala desa wajib dilaksanakan secara keterbukaan, bertanggung jawab, dan disertai partisipasi oleh masyarakat, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola, memimpin, dan berkomunikasi dengan baik agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Meski pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tingkatan yang paling bawah akan tetapi dinamika politik yang mengikutinya tidaklah mudah, karena pemilihan kepala desa menjadi fenomena pemilihan umum yang menarik, dimana untuk memperebutkan kursi kepala desa sangatlah sengit dan diperebutkan oleh banyak orang. Pilkades seringkali diwarnai dengan berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang marak terjadi dalam pilkades adalah politik uang.

Secara umum masyarakat memahami politik uang sebagai bentuk pemberian hadiah berupa uang atau barang kepada calon pemilih agar orang tersebut memilih calon yang telah ditentukan. Politik uang dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang guna mempengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan hadiah tertentu dalam usaha untuk mempengaruhi hasil pemilihan politik lainnya (Rahmi, et al., 2022).

Bagi sebagian calon kepala desa, dengan memberikan uang mereka akan mendapatkan kekuasaan secara instan. Uang acap kali dipergunakan sebagai alat guna mendapatkan kekuasaan secara cepat, apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai modal sosial (Astuti & Marlina, 2022). Uang saat ini sangat berkuasa sehingga menimbulkan fenomena-fenomena kemalasan untuk melaksanakan kegiatan sosial yang memerlukan waktu yang cukup lama (Astuti & Marlina,

2022). Maka sangatlah wajar jika politik uang menjadi merajalela dalam berbagai proses pemilihan legislatif, presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa.

Fenomena praktik politik uang cukup menjadi perhatian di beberapa wilayah. Dimana seorang calon kepala desa yang tertangkap tangan melakukan praktik politik uang menjelang pelaksanaan pilkades di Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, politik uang yang diberikan bervariasi, dari Rp. 100.000-200.000 (Kompas, 2015). Bukan hanya dilakukan oleh calon kades, Bandar judi juga turut terlibat dalam pelaksanaan politik uang. Dalam penyelenggaraan pilkades Bandar judi dari sekitar desa diduga juga turut hadir untuk aktif dalam arena taruhan dan bahkan ikut mempengaruhi hasil pemilihan, (Kompas, 2015).

Desa Xxx merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Desa Xxx merupakan salah satu desa yang melaksanakan proses pilkades dengan tingkat dinamika yang cukup menarik. Kemenarikan tersebut salah satunya dengan adanya isu praktik politik uang. Meskipun praktik politik uang ini tidak dapat dibuktikan secara hukum, namun berdasarkan observasi praktik politik uang ini sudah berjalan selama dua periode.

Secara umum proses pemilihan kepala desa di Desa Xxx hampir sama dengan desa-desa lainnya. Namun yang menarik dalam pemilihan kepala desa di Desa Xxx terletak pada kondisi politiknya, dimana politik uang dalam pemilihan kepala desa ini terjadi karena calon kepala desa yang maju pada tahun 2022 merupakan kandidat yang sama pada pemilihan kepala desa 2016 dan beliau merupakan kandidat pertama yang melakukan praktik politik uang dalam pilkades Desa Xxx. Sehingga situasi politik uang dalam pilkades 2022 yang terjadi di Desa Xxx menjadi sorotan di Kecamatan Kepung pada saat itu.

Uang menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi bagi siapapun calon kepala desa, karena ketika dirinya mencalonkan sebagai kepala desa di Desa Xxx harus siap untuk *open house*, dimana seseorang calon kepala desa harus siap

menerima tamu yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang bertujuan untuk menyalurkan dukungan ataupun hanya bersilaturahmi. Tradisi *open house* ini bisa terjadi berminggu-minggu hingga hari H pemungutan suara, namun puncak *open house* ini terjadi pada malam H-1 pemungutan suara. Pada saat malam h-1 pemungutan suara, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh panitia pemungutan suara harus *sowan* kepada seluruh calon kepala desa. Hal itu ditujukan untuk menekan konflik dan menetralisasi antara masyarakat, panitia dan calon kepala desa. Untuk *open house* seorang calon kepala desa harus menjamu tamu yang datang dengan menyediakan makanan berat, makanan ringan, minuman dan rokok.

Para calon kepala desa Desa Xxx dalam kampanye mereka tidak ada yang mengiming-imingi dalam pembangunan infrastruktur, karena semenjak gunung kelud meletus desa xxx sudah banyak perkembangan mengenai pembangunan infrastruktur. Seperti halnya pembangunan jalan aspal yang tidak hanya di jalan utama saja, namun juga di gang-gang sempit, adanya puskesmas desa, embung, dan lain sebagainya.

Pada pemilihan kepala desa xxx tahun 2022 terdapat empat kandidat, dimana nomor urut satu yaitu Pujiono, nomor urut dua Mulyono, nomor urut tiga Gunawan, dan nomor urut empat adalah Widodo yang merupakan kepala desa periode 2016-2022. Dari observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan beberapa fakta berikut ini :

Pada malam H-1 pemungutan suara, biasanya terdapat praktik politik uang, dimana tim sukses calon kepala desa yang melakukan praktik politik uang melakukan pemberian amplop berisi uang dan memberikan barang kepada calon hak pilih. Namun dalam praktik politik uang di Desa Xxx tahun 2022 menjadi hal yang menarik, dimana semula Mulyono sebagai calon dengan nomor urut dua memberikan uang sebanyak 100 ribu kepada setiap hak pilih, kemudian ketika mendengar Widodo sebagai calon dengan nomor urut empat dan beliau dulunya juga menjabat sebagai kepala desa periode 2016-2022 juga memberikan uang

senilai 50 ribu kepada hak pilih kemudian Mulyono langsung memerintahkan tim suksesnya untuk menambah 50 ribu kepada setiap hak pilih. Sehingga total uang yang diberikan oleh Mulyono kepada hak pilih mencapai 150 Ribu.

Dua calon antara Mulyono sebagai nomor urut dua dan Widodo sebagai nomor urut empat memang menjadi calon yang bersaing ketat, karena keduanya memiliki dasar kekeluargaan dan kekayaan yang kuat. Dan dua calon lain yaitu Pujiono sebagai nomor urut satu dan Gunawan sebagai nomor urut tiga tidak melakukan praktik politik uang.

Menurut beberapa warga mereka mendapatkan *double* amplop dalam pemberian uang politik uang. Hal tersebut menyebabkan pemberian uang dalam politik uang tersebut tidak merata. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu hak pilih, dalam satu rumah mereka mendapatkan uang hingga 700 dalam pilkades Desa Xxx tahun 2022 padahal dalam satu rumah tersebut hanya terdapat dua hak pilih. Menurut mereka terima saja uang yang diberikan, karena semua orang membutuhkan uang.

**Tabel 1. 1 Hasil Rekapitulasi Suara Calon Kepala Desa Xxx
Tahun 2022**

No. Urut	Nama Calon	Jumlah
1	Pujianto	166
2	Mulyono	1.020
3	Guntur	91
4	Widodo	1.458
Suara Tidak Sah		35

Sumber : Panitia pemilihan Kepala Desa Xxx , tahun 2022

Tepat di hari pemungutan suara dan penghitungan suara, kemenangan diduduki oleh Widodo sebagai nomor urut empat dengan mendapatkan suara

sebanyak 1.458 suara, dan beliau juga merupakan kepala Desa Xxx periode 2016-2022. Kemenangan nomor urut dua dimenangkan oleh Mulyono dengan perolehan 1.020 suara.

Berdasarkan dari beberapa poin diatas yang menjadi pusat penulis dalam penelitian ini yaitu terkait dengan adanya indikasi praktik politik uang yang dikerjakan oleh kandidat kepala desa terhadap masyarakat desa Xxx . Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi terhadap Pilkades di Desa Xxx Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 di Desa Xxx , Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, sehingga peneliti mengambil Tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk melihat bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 di Desa Xxx , Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat berguna yang kemudian dapat diperluas dan ditingkatkan di masa mendatang. Beberapa manfaat dari penelitian ini meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan konsep kajian sosiologi politik tentang praktik politik uang dari adanya sebuah pemilihan kepala desa dan diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak kalangan.
2. Hasil dari penelitian ini didambakan dapat dimanfaatkan sebagai bekal rujukan bagi pembaca dan pada penelitian yang berkaitan dengan politik uang, khususnya yang berkaitan dengan politik uang Kepala Desa Xxx , baik dari ruang lingkup Universitas Trunojoyo Madura maupun di tempat lain.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Bagi Mahasiswa :

- a) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai praktik politik uang, khususnya dalam konteks pemilihan Kepala Desa. Melalui pengetahuan yang diperoleh dapat membuka wawasan dan memahami dinamika sosial dalam konteks politik lokal.
- b) Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analisis praktis yang dapat diterapkan dalam menganalisis situasi politik lokal dan mengidentifikasi dampak politik uang terhadap proses demokrasi.
- c) Pemahaman politik uang dalam pemilihan kepala desa adalah isu kontemporer yang relevan dengan tantangan demokrasi di tingkat lokal. Mahasiswa dapat menyumbangkan ide-ide untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
- d) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang sosiologi dengan membahas dampak praktik politik uang terhadap struktur sosial dan interaksi di tingkat desa. Hal ini dapat membuka wawasan baru dalam kajian sosiologi politik.

2. Bagi Masyarakat :

- a) Dapat menjadi landasan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap praktik politik uang, yang memungkinkan mereka untuk menjadi pemilih yang lebih kritis baik memilih kepala daerah tingkat lokal maupun pada tingkat nasional
- b) Penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi, dapat memilih calon berdasarkan integritas dan kapabilitas daripada berdasarkan imbalan finansial. Dan masyarakat juga dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap informasi politik, memfilter pesan yang mungkin terpengaruh oleh praktik politik uang.

3. Bagi Pemerintah Desa :

- a) Bagi pemerintah daerah Desa Xxx dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembentukan kebijakan dalam penegakan sistem demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Xxx Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
- b) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam kepada pembaca tentang pesta demokrasi ditingkat lokal khususnya kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang.